



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN 2020**



**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Painan , Desember 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Drs. AZRAL

NIP. 196212311986021039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
BAB I PENDAHULUAN	1.
1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	1.
1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	3.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4.
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6.
2.1 Ikhtisar realisasi penncapaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	6.
BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	21
3.1 Laporan Realisasi Anggaran	21
3.1.1 Pendapatan	21
3.1.2 Belanja	22
3.2 Laporan Operasional	24
3.3 Neraca	24
3.4 Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsilisinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda	29
BAB IV PENUTUP	34



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Desember 2020
Kepala,



Drs. A Z R A L

NIP 19621231 198602 1 039

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur

Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 418.688.000 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.121.618.400 atau realisasi pendapatan sebesar 37,32%

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp 9.015.485.685,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.339.590.087,- atau mencapai 96,52 persen

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 418.688.000-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5.451.147.085,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.032.459.085) ,-.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 109.319.221.341,92 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 288.779.490,- dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 109.030.441.851,92 yang terdiri dari tanah sebesar Rp. 9.317.559.684,44 Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.592.628.417,72 Gedung dan bangunan sebesar Rp. 106.676.105.004,34 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 5.375.880.954,00 aset tetap lainnya sebesar Rp. 0, Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp. 2.955.455.900,17 Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.(18.895.938.108,75) dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,- Nilai Kewajiban Rp. 1.284.547.582,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 108.034.673.759,92

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN.

3.1 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Belanja

3.2 Laporan Operasional

3.3 Neraca

3.4 Kewajiban

3.5 Equitas dana

3.6 Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA

BAB VI

P E N U T U P

B A B II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 11 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ;
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ;
- f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri ;
- g. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
- h. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Realisasi kinerja keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.699.126.325	5.471.672.511	96,01
1.02.1.02.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.548.500	549.977.649	91,58
1.02.1.02.11.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	174.600.000	146.446.974	83,88
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	2.400.000	1.541.220	64,22
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.600.000	6.353.500	66,18
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	148.200.000	136.166.987	91,88
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja Kawat/Faximile/Internet	14.400.000	2.385.267	16,56
1.02.1.02.11.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	116.200.000	116.200.000	100,00
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	116.200.000	116.200.000	100,00
1.02.1.02.11.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	180.636.000	176.973.500	97,97
1.02.1.02.11.01.08.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	166.000.000	166.000.000	100,00
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.636.000	10.973.500	74,98
1.02.1.02.11.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.654.200	36.500.450	99,58
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	35.154.200	35.000.450	99,56
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00
1.02.1.02.11.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.585.100	13.973.000	64,73
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.594.500	5.532.000	57,66
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.990.600	8.441.000	70,40

1.02.1.02.11.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.564.000	5.563.000	99,98
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.564.000	5.563.000	99,98
1.02.1.02.11.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.300.000	4.320.000	57,60
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000	4.320.000	96,00
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	3.000.000	0	0,00
1.02.1.02.11.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	24.150.000	21.876.525	90,59
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000	4.791.600	79,86
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000	11.528.550	99,81
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.600.000	5.556.375	84,19
1.02.1.02.11.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17.609.200	15.934.200	90,49
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	6.850.000	5.175.000	75,33
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	10.759.200	10.759.200	100,00
1.02.1.02.11.01.20.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	16.050.000	12.190.000	75,93
1.02.1.02.11.01.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.050.000	12.190.000	75,93
1.02.1.02.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.620.000	126.136.800	93,11
1.02.1.02.11.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	49.650.000	99,30
1.02.1.02.11.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.650.000	99,30
1.02.1.02.11.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72.450.000	66.583.800	91,90
1.02.1.02.11.02.24.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.000.000	21.000.000	100,00

1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000	30.550.300	99,84
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.800.000	3.602.000	94,79
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.800.000	10.067.500	78,65
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.250.000	1.364.000	32,09
1.02.1.02.11.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.170.000	9.903.000	97,37
1.02.1.02.11.02.26.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.170.000	9.903.000	97,37
1.02.11.1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	457.363.875	391.323.325	85,56
1.02.11.1.02.11.16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	39.336.625	39.336.625	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.800.000	4.800.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.01.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.000.000	8.000.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000	1.250.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.339.300	2.339.300	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	9.350.000	9.350.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.06.001.	Belanja cetak	0	0	0,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000	500.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000	1.750.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	300.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.997.325	1.997.325	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.025.000	3.025.000	100,00

1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.1.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	2.025.000	2.025.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.03.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.200.000	4.200.000	100,00
1.02.11.1.02.11.13.01.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	471.250	471.250	100,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	196.250	196.250	100,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.11.006.	Belanja Makan dan Minum peserta			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	275.000	275.000	100,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			0,00
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.15.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
1.02.11.1.02.11.16.13.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	417.358.000	351.315.650	84,18
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.01.001.	Honorarium Tenaga Non Pegawai	52.000.000	52.000.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.975.000	28.005.000	96,65
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000	10.777.500	63,40

1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.01.006.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000	0	0,00
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	25.875.000	21.650.000	83,67
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.03.012.	Belanja Akomodasi	90.450.000	80.100.000	88,56
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.06.001.	Belanja cetak	2.350.000	2.190.000	93,19
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.058.000	8.225.000	90,80
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26.250.000	26.250.000	100,00
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000	2.598.750	49,50
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.11.002.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.700.000	33.944.400	95,08
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.250.000	4.525.000	15,47
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.1.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	9.200.000	3.050.000	33,15
1.02.11.1.02.11.16.13.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	78.000.000	78.000.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	16.908.300	16.908.300	100,00
1.02.11.1.02.11.18.04.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	725.000	725.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500.000	500.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00

1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat			0,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000	100.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	125.000	125.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	16.183.300	16.183.300	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.223.300	4.223.300	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.014.				0,00
	Belanja Dekorasi			
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.110.000	1.110.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman Peserta			0,00

1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Olahraga			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.000	7.525.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1.325.000	1.325.000	100,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga			0,00
2.00.06.1.02.11.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	211.615.100	208.001.837	98,29
2.00.06.1.02.11.15.03.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang	5.026.750	5.026.750	100,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	951.750	951.750	100,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.825.000	1.825.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	250.000	250.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.	Operasionalisasi dan Perlengkapan UPTD Kemetrelogian	203.237.950	199.744.687	98,22
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.750.000	96.750.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.513.800	1.513.500	99,98
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000	500.000	100,00

2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko materai	120.000	120.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.646.000	3.646.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.114.950	12.862.600	98,08
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.02.010.	Belanja Bahan Laboratorium	6.394.000	6.394.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.002	Belanja Air	2.700.000	2.075.000	76,85
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.003	Belanja Listrik	25.800.000	24.059.437	93,25
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.006	Belanja Kawat/Faximile/Internet	7.200.000	6.646.000	92,31
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	500.000	500.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.458.200	1.447.000	99,23
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.05.002.	Belanja Suku Cadang	12.000.000	11.896.000	99,13
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000	3.274.150	90,95
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.170.000	5.170.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	106.000	106.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.270.000	5.270.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.965.000	7.965.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	550.000	550.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.04.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.000.000	3.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.22.	Pemantauan Harga dan Operai Pasar	3.230.400	3.230.400	100,00

2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.121.000	1.121.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok			0,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	309.400	309.400	100,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.425.000	1.425.000	100,00
2.00.06.1.02.11.15.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	375.000	375.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.253.796.03	4.153.053.90	97,63
2.00.06.1.02.11.18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	18.907.250	18.907.250	100,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.000.000	8.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.282.250	3.282.250	100,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000	250.000	100,00

2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda			0,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.375.000	5.375.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			0,00
2.00.06.1.02.11.18.33.	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	340.338.200	484.936.030	89,72
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	100.000	0	0,00
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	466.500.000	433.650.000	92,96
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000	9.950.000	99,50
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.600.000	10.888.250	61,87
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.903.200	4.152.800	84,70
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	4.500.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	792.000	28,80
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.485.000	20.625.000	63,49
2.00.06.1.02.11.18.33.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1.700.000	400.000	23,53
2.00.06.1.02.11.18.36.	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	1.620.392.600	1.579.928.600	98,88
2.00.06.1.02.11.18.56.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	24.600.000	24.600.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.56.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.595.792.600	3.555.338.600	98,87
2.00.06.1.02.11.18.10.	Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	49.960.000	43.250.000	90,57

2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.1.01.002.	Honorarium Pengadaan Barang dan jasa	1.700.000	500.000	29,41
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	550.000		0,00
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000		0,00
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000		0,00
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000		0,00
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.2.15.001.	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000		0,00
2.00.06.1.02.11.18.10.5.2.2.19.002.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	45.000.000	44.750.000	99,44
2.00.06.1.02.11.18.17.	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Peningkatan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (Pemulihan Dampak Ekonomi Akibat Covid 19)	24.000.000	24.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.17.5.2.1.19.002.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	15.000.000	15.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.18.17.5.2.3.20.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.000.000	9.000.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22.443.300	22.443.300	100,00
2.00.07.1.02.11.16.02.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	1.363.000	1.363.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000	640.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi			0,00

2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat			#DIV/0!
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan			0,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.13.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	625.000	625.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	300.000	300.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.02.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			0,00
2.00.07.1.02.11.16.15.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.	Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	6.270.000	6.270.000	100,00
2.00.06.1.02.11.16.06.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.800.000	4.800.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	370.000	370.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00

2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	300.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	350.000	350.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	450.000	450.000	100,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			0,00
2.00.07.1.02.11.16.22.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08	Pembinaan dan Pengawasan IKM	14.610.500	14.610.500	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.1.02.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.000.000	8.000.000	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	930.500	930.500	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.06.001.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.01.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.07.001.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	300.000	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.01.001.	Belanja makanan dan minuman pelatihan			0,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.780.000	2.780.000	100,00
2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.01.001.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	600.000	600.000	100,00

2.00.06.1.02.11.16.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			0,00
2.00.07.1.02.11.19.	Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial	3.825.000	3.825.000	100,00
2.00.07.1.02.11.19.03.	Penumbuhan dan penataan sentra-sentra industri unggulan	3.825.000	3.825.000	100,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000	400.000	100,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.07.002.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	300.000	0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.125.000	1.125.000	100,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			0,00
2.00.07.1.02.11.19.05.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			0,00
	JUMLAH	5.699.126.325	5.471.672.511	96,01

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Pelayanan Pasar (sewa petak toko dan pelataran) . Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2020 adalah Rp 1.121.618.400 dengan realisasi sebesar Rp 418.688.000 atau sebesar 37,32%.

Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Persentase
Retribusi Pelayanan Pasar	1.121.618.400	418.688.000	37,32%

Rendahnya realisasi PAD atau Tidak Tercapainya Realisasi PAD pada tahun 2020 karena :

1. Adanya pembebasan retribusi oleh Bupati Pesisir Selatan selama 2 (dua) bulan dalam rangka tanggap darurat covid 19.
2. Kondisi petak yang rusak dan jarang ditempati untuk berjualan seperti pasar painan, pasar batang kapas dan pasar baru bayang menyebabkan pedagang tidak mampu membayar retribusi.
3. Penetapan target PAD yang terlalu tinggi dibandingkan potensi PAD yang ada.
4. Belum terisinya petak baru setelah serah terima kunci (pedagang belum mulai berjualan) khususnya pasar tapan dan pasar inderapura
5. Tidak operasionalnya pasar muarasakai yang baru karena pedagang pindah kembali ke pasar lama.

3.1.2 Belanja

Belanja terdiri dari Beban Operasi dan Belanja Modal. Jumlah belanja operasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah sebesar Rp.5.734.797.487 sedangkan Belanja Modal berjumlah sebesar Rp. 3.604.792.600

Realisasi belanja Operasi dan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
I	Belanja Operasi		
1	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	2.561.691.417,-	2.545.246.831,-
	- Tambahan Penghasilan PNS	1.002.867.300,-	1.095.216.931,-
	- Insentif Pemungutan Ret Daerah		
	Jumlah Belanja Pegawai	3.564.558.717	3.604.792.600
2.	Belanja Barang/Jasa		
	Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2020		
	Rp. 1.907.333.911 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	279.499.973	177.554.450
	- Belanja Bahan/Material	75.927.000	6.394.000
	- Belanja Jasa Kantor	361.775.868	295.147.411
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.018.533	31.650.650
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	123.960.600	35.980.200
	- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	231.700.000	28.000.000
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	137.058.000	5.700.000
	- Belanja Makanan dan Minuman	112.885.150	61.209.000
	- Belanja Pakaian Kerja	8.000.000	5.270.000
	- Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu	23.000.000	0
	- Belanja Perjalanan Dinas	614.084.773	95.119.200

- Belanja Pemeliharaan	272.965.000	59.553.000
- Belanja Jasa Konsultansi	64.650.000	59.750.000
- Belanja Hibah Barang	895.567.000	0
- Belanja Honorarium Non Pegawai	165.100.000	85.200.000
- Belanja Honorarium Pegawai	239.000.000	167.400.000
- Belanja Honorarium Non PNS	714.250.000	793.400.000
- Beban Jasa Pihak Ketiga		85.200.000
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.600.000,-	
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	10.600.000	
Sub Jumlah	4.382.041.897	5.451.147.085

II

Belanja Modal

26.565.688.093

3.564.338.600

Belanja Modal Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 3.564.338.600- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel tak Bermesin	-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	104.195.000
- Belanja Modal Pengadaan alat rumah tangga	
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.835.100
- Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	
- Belanja Modal Pengadaan meja & kursi kerja	
- Belanja Modal Pengadaan alat studio	7.101.300

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.466.453.693	3.564.338.600
- Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	952.103.000	
Sub Jumlah	26.565.688.093	3.564.338.699

3.2. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, menyajikan informasi tentang Pendapatan LO yang berasal dari Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Retribusi Pelayanan Pasar. Beban yang merupakan Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, dan Beban Barang dan Jasa. Pendapatan-LO dan Beban disajikan dengan membandingkan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Realisasi pada Tahun 2019. Laporan Operasional juga menyajikan surplus/defisit LO yang menyajikan selisih antara Realisasi Pendapatan LO dengan Beban, dengan rincian sebagai berikut :

3.3. Neraca

3.3.1 Aset

Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Kas		
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	Saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
	Kas di Bendahara	0	0

	Pengeluaran		
	Jumlah	0	0
2	Piutang		
	Piutang Retribusi	368.292.000	428.406.000
	Saldo kas Piutang pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp428.406.000,- . Selama tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 84.942.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp.24.828.000,-		
	Piutang Retribusi P	0	0
	Jumlah	0	0
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.015.080)	(144.138.510)
	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 144.138.510 . Selama tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 84.942.000 dan mutasi kurang sebesar Rp. 24.828.000		
3.	Persediaan		
	Persediaan	5.659.700	4.512.000
	Saldo Persediaan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 4.512.000,- .		
	Persediaan Alat Tulis Kantor		4.512.000
	Persediaan Benda Pos		
Aset Tetap			
No.	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Aset Tetap	112.059.903.797,00	109.030.441.851,92
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar 112.059.903.797,00		
	dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.030.441.851,92		
	dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Tanah	9.067.159.684,-	9.317.559.684,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 9.317.559.684,- terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 230.400.000,-		
	2. Peralatan Dan Mesin	3.943.396.554,-	3.592.628.418,-

- Alat Angkutan Bermotor	Alat Darat	1.755.488.172,-	1.755.488.172,-
- Alat Angkutan Berat Bermotor	Tak	48.574.784,-	48.574.784,-
- Alat Bengkel Bermesin		2.416.917	2.416.917
- Alat Bengkel Tak Bermesin		2.648.914	2.648.914
- Alat Ukur		433.492.493,-	433.492.493,-
- Alat Kantor		386.003.750,-	367.819.650,-
- Alat Rumah Tangga		667.461.815,-	614.353.771,-
- Komputer		404.351.853,-	231.036.428,-
- Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat		107.430.664,-	86.442.664,-
- Alat Studio		42.139.125,-	40.354.983,-
- Alat Komunikasi		8.928.309,-	8.949.000,-
- Unit unit Laboratorium		83.876.758,-	83.876.758,-

Terdapat mutasi kurang selama Tahun 2020 sebesar Rp. 350.768.136 yaitu untuk penghapusan beberapa aset peralatan dan mesin kantor.

3. Gedung dan bangunan 93.148.008.418,- 106.676.105.004,34

- Bangunan gedung Tempat Kerja		85.270.187.475,-	98.798.284.061,34
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal		125.000.000,-	125.000.000,-
- Bangunan Lainnya		7.752.820.943,-	7.752.820.943,-

Dalam tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 13.528.096.586

4. Jalan Irigasi dan Jaringan 5.375.880.954,- 5.375.880.954,-

- Jalan		2.134.422.481,-	2.134.422.481,-
- Bangunan Air Kotor		3.192.051.973,-	3.192.051.973,-
- Instalasi lainnya		49.406.500,-	49.406.500,-

Tidak terdapat mutasi tambah selama Tahun 2020

5. Aset Tetap Lainnya 8.750.000,- 8.750.000,-

- Buku		8.125.000,-	8.125.000,-
- Terbitan		625.000,-	625.000,-
-			

Tidak terdapat mutasi tambah selama Tahun 2020

5. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) 496.708.187,- 2.955.455.900,17

Dalam Tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 2.720.854.400,-. Dan mutasi kurang sebesar Rp. 262.106.687 Adapun rincian tambahan KDP pada tahun ini adalah Sbb:

N O	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan KDP
1	2	3	4
1	Pasar Air Pura (Jasa Konsultasi Pematangan Lahan)	42.167.250	2020
2	pasar rakyat mandeh (Jasa Konsultasi)	40.478.000	2020
3	pasar Barung- Barung Belantai (Jasa konsultasi)	45.350.000	2020
4	Pasar Sungai Sirah (Jasa Konsultasi)	45.200.000	2020
5	Pasar Lakitan+Review Design (Jasa Konsultasi)	75.300.000	2020
6	pasar Lunang (Jasa Konsultasi pembangunan lanjutan)	45.300.000	2020
7	Pasar Painan (Jasa Konsultasi)	50.325.000	2020
8	pasar sungai tunu (Jasa Konsultasi Perorangan (DED) Rehab)	4.500.000	2020
9	Bisnis Center Painan (Jasa Konsultasi Perorangan (DED) Pembangunan Canopy)	4.500.000	2020
10	Pasar Surantih (Pekerjaan fisik gedung)	1.180.749.350	2020
11	Hutang fisik pasar surantih	1.186.984.800	2020
	JUMLAH	2.720.854.400	

Peningkatan jumlah KDP yang sangat tinggi terlihat pada item pekerjaan pembangunan pasar surantih. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.841.250.000,- untuk Pembangunan Pasar Suratih. Setelah melalui proses lelang maka dilakukanlah penunjukan penyedia dan pelaksana serta penandatanganan surat perjanjian pekerjaan pembangunan Pasar Surantih berdasarkan surat perjanjian No

08/SP/DAG/DKUP.2-PS/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.637.744.000,-. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan segera maka sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 di refocusing. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA 2020 telah dilakukan penyesuaian belanja terhadap seluruh OPD sehingga anggaran yang tersedia untuk pembangunan Pasar Surantih berjumlah Rp.1.055.097.600,- (40% dari nilai kontrak), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.582.646.400,- (60%) diakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per tanggal 31 desember 2020 bobot fisik baru mencapai 84,7% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.055.097.600,- (100% dari anggaran yang tersedia) .

6. Akumulasi Penyusutan	(16.004.402.199,09) (18.895.938.108,75)
- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(3.368.270.279,82)
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(10.299.405.499,23)
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(2.336.726.420,04)

3.3.2 Kewajiban

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kewajiban pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah Rp. 1.284.547.582

No.	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1.	Kewajiban	555.000	1.284.547.582
	Jumlah Kewajiban pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. . 1.284.547.582 . Dengan uraian sebagai berikut :		
	Hutang Air	555.000	300.500
	Hutang TPP		97.262.282
	Hutang pada pihak ketiga (Pembangunan Pasar Surantih)		1.186.984.800
	Jumlah	555.000	1.284.547.582

3.3.3 Ekuitas Dana

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat ekuitas dana sebesar Rp. 108.034.673.759,92

3.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

3.2.1. Neraca

Neraca Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2020 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai asset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

b. Ekuitas Dana Lancar

- c. Ekuitas Dana Investasi
- d. Ekuitas Dana Cadangan

3.3.2. Laporan Realisasi Anggaran

3.3.2.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.3.2.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.